DETERMINAN KEMISKINAN PADA 10 PROVINSI DI PULAU SUMATERA

(Tesis)

Oleh

Zainul Hamzah

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

DETERMINAN KEMISKINAN PADA 10 PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Oleh
Zainul Hamzah

Permasalahan Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi dan tidak dapat terlihat secara mudah hanya dari suatu angka absolut. Masalah kemiskinan provinsi tidak terlepas dari berbagai aspek-aspek di setiap wilayah pada penelitian ini masalah kemiskinan dikaji pada wilayah provinsi di pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan Data Panel gabungan dari sebuah data antara runtun waktu dan observasi wilayah, dimana runtun waktu (*time series*) yang digunakan pada penilitian ini pada periode 2017-2021, dengan menggunakan observasi wilayah atau (*cross section*) yaitu meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penilitian menggunakan Metode Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukan Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Persenatse Penduduk Miskin pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

kata kunci : Kemiskinan, Kualitas SDM, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka

ABSTRACT

DETERMINANTS OF POVERTY IN 10 PROVINCES IN SUMATRA ISLAN

BY
Zainul Hamzah

Poverty is a complex and multidimensional problem and cannot be seen easily only from an absolute number. The problem of provincial poverty is inseparable from various aspects in each region. In this study, the problem of poverty is studied in the province of Sumatra island. Sumatra Island has 10 provinces. This study aims to determine the effect of macroeconomic variables, namely the quality of human resources, income inequality and the level of open unemployment on the percentage of poor people in 10 provinces on the island of Sumatra. This study uses a combined Panel Data from data between time series and regional observations, where the time series (time series) used in this research is in the 2017-2021 period, using regional observations or (cross section) covering the area of Aceh, North Sumatra. , South Sumatra, West Sumatra, Riau, Jambi, Riau Islands, Bangka Belitung Islands and Lampung. In this study, secondary data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS). This research uses Panel Data Regression Method. The results showed that the quality of human resources had a negative and significant influence, income inequality and the open unemployment rate had a positive and significant impact on the percentage of poor people in 10 provinces on the island of Sumatra.

Keywords : *Poverty, Quality of human resources, Income Inequality and Open Unemployment Rate*

DETERMINAN KEMISKINAN PADA 10 PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Oleh

Zainul Hamzah

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER EKONOMI

Pada

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Tesis	: **DETERMINAN KEMISKINAN PADA 10 PROVINSI DI PULAU SUMATERA**
Nama Mahasiswa	: *Zainul Hamzah*
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1921021005**
Program Studi	: **Magister Ilmu Ekonomi**
Fakultas	: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si	**Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**
NIP 19560325 198303 1002	NIP 19670710 199003 2001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Marselina, S.E., M.P.M.
NIP 19670710 199003 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si**	.....
Sekretaris	: **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**	.....
Penguji Utama	: **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si**	.....
Anggota Penguji	: **Dr. Arivina Ratih Y Taher, S.E., M.M.**	.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP 19660621 199003 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulusan Ujian : **11 Agustus 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022
Penulis

Zainul Hamzah

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Zainul Hamzah, penulis dilahirkan pada tanggal 2 Maret 1993 di Wana. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan bapak Muhsin dan ibu Jeliah.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Wana Melinting dan lulus pada tahun 2006. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan pada tahun 2009 dari SMP Kosgoro 1 Bandar Sribhawono. Kemudian penulis melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas SMAN Negeri 1 Melinting dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa dan menyelesaikan pendidikan sarjana nya pada tahun 2016 bulan Januari. Setelah lulus Sarjana dan bekerja langsung di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa sebagai Operator PDDIKTI dan staft administrasi. Pada bulan Juli 2019 penulis melanjutkan pendidikan tingkat Magister Ilmu Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil a'lamin dengan penuh puji syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, ku persembahkan karya sederhana ini untuk :

Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih untuk bapakku Muhsin, atas motivasi dan dukungan selama anakmu menjalani kehidupan, panutan dalam hidup dan guru terhebat, serta rasa kasih sayang yang tidak terhingga dari ibuku jeliah, karena arahan nasehatnya dan doa yang panjang darinya sebagai modal dari hidup yang panjang bagiku.

Keluarga besar, sahabat, serta teman-teman

Terima kasih telah membantu dan menemani hari-hariku.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Magister Ilmu Ekonomi yang telah memberikan motivasi, arahan, pelajaran, dan nasihat yang sangat membantu dan membangun. Serta almamater tercinta Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTO

“Kamu tidak harus menjadi besar untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi besar”

(Zig Ziglar)

SANWACANA

Puji syukur kehadirat allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***"Determinan Kemiskinan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera"*** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak dibantu dan didukung oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M., Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, motivasi, dukungan, semangat serta memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis sehingga tesis ini terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran,

memberikan perhatian, motivasi, dukungan, semangat serta memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis sehingga tesis ini terselesaikan.

5. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Arivina Ratih Yulia T, S.E., M.M. selaku Dosen Penguji dan Pembahas, yang telah memberikan saran, arahan, tambahan ilmu sehingga tesis ini dapat selesai dengan hasil yang baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi: Bapak Prof. S.S Pandjaitan, S.E., Ibu Lies Maria Hamzah, S.E., M.E., Bapak Dr. I Wayan Suparta. S.E., Bapak Dr. Yoke Moelgini, M.SC., Alm. Bapak Dr. Saimul S.E., M.Si., Ibu Dr. Ida Budiarti, S.E., M.Si., Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M., Bapak Dr. Ambya, S.E., M.Si., Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M., Bapak Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Si. Akt., dan Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si.Akt., CA, serta seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Ayah dan Ibu tercinta, Muhsin dan Jeliah yang memberiku doa yang panjang untuk kelangsungan hidupku, kekuatan hidup serta semangat untuk selalu berjuang dan bekerja keras dalam segala hal. Memberikan nasihat dan selalu sabar menunggu anaknya terus berkembang dan berproses dalam hidup.
8. Kakak Sella Merista S.Pd, selaku admin jurusan serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terima kasih atas seluruh bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis.
9. Sahabat sejatiku yang selalu diberkahi Tuhan : Alm. Sobri, Saddam H., Riki Firdaus, Sandi, Acung Nasrullah, Heri Pratama, Ali Rafsanjani, Samsul,

Supriyadi, Sudirman, Heru Hermawan, dan Hendri, terimakasih telah menjadi tim yang setia dalam perjalanan pembuatan tesis ini, serta berbagai pelajaran atas segala bentuk peningkatan mental, rohani dan jasmani serta doa dengan amin yang panjang. Semoga barokah, kita abadi yang fana itu waktu.

10. Terimakasih juga untuk teman angkatan 2019 Magister Ilmu ekonomi, Febriyanto W., Nuris S., Andri S., Yohanes N. A., Masayu F., M. Ahadi N., Mega M., Rini A., Bima P. K., Anggun Y. A., Sony P., Riska M., A. Dhea Pratama (Boy) dan Hardiansa N. S. telah berbagi ilmu dan mau saling membantu dalam perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022
Penulis,

Zainul Hamzah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10

BAB II. TINJUUAN PUSTAKA **11**
A. Kemiskinan 11
1. Pengertian Kemiskinan 13
2. Ukuran Kemiskinan 15
3. Penyebab Kemiskinan 15
B. Indeks Pembangunan Manusia 16
1. Pengertian Pembangunan Manusia 16
1.1 Indeks Pembangunan Manusia 18
1.2 Teori Pembangunan Manusia 19
1.3 Komponen Indek Pembanguan Manusia 20
1.4 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia 21
1.5 Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Tingkat Kemiskinan 23
C. Ketimpangan Pendapatan 24
1. Hubungan Ketimpangan Pendapatan dengan Tingkat Kemiskinan 26
D. Pengangguran 27
1. Pengertian Pengangguran 27
1.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan 33
E. Tinjauan Empiris 34
F. Kerangka Pemikir 40
G. Hipotesis 42

BAB III. METODE PENELITIAN 43
A. Jenis, Sumber data dan Variabel Penelitian 43
B. Definisi Operasional Variabel 44
C. Regresi Linier Berganda dengan Panel Data 44
D. Pemilihan Model Data Panel 45
E. Uji Lagrange Multiplier (LM) 48
F. Uji Asumsi Klasik 49
G. Uji Hipotesis t dan F Statistik 50
H. Koefisien Determinasi (R^2) 52
I. Individual Effect 52

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 53
A. Analisis Statistik Deskriptif 53
B. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel 54
C. Pengujian Asumsi Klasik pada Model Data Panel 55
D. Hasil Estiminasi Regresi Data Panel dengan Model Fixed Effect 57
E. Hasil Uji t (Parsial) 59
F. Hasil Uji F-Statistik 60
G. Hasil Koefisien Determinasi 60
H. Hasil dan Analisis Individual Effect 61
I. Pembahasan 62

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR TABEL

1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM.....23
2. Nama Variabel, Simbol Satuan dan Sumber Data 43
3. Analisis Statistik Deskriptif 53
4. Hasil Uji Chow.....54
5. Hasil Uji Housman.....55
6. Hasil Pengujian Multikolinieritas 56
7. Hasil Pengujian Heterokedastisitas.....56
8. Hasil Pengujian Autokorelasi.....57
9. Hasil Ordinary Least Square (OLS) Pada Model Fixed Effect.....57
10. Hasil Uji t-statistik 59
11. Hasil Uji F statistik 60
12. Hasil Individual Effect 10 Provinsi di Pulau Sumatera 61

DAFTAR GAMBAR

1. Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa) ……... 4
2. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia 10 Provinsi di Pulau Sumatera 2017-2021 ……. 5
3. Rata-rata Gini Ratio 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 … 7
4. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 ……... 8
5. Kurva Lorenz …… 26
6. Kerangka Pemikiran ……. 42
7. Pemilihan Model Data Panel …… 45
8. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ……. 64
9. Rata-rata Gini Ratio dan Persentase Penduduk Miskin di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ……. 67
10. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Penduduk Miskin di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ……. 69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Persentase Penduduk Miskin, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka ……... L-1
2. Hasil Pengujian Fixed Effect/Cow Test …… L-3
3. Hasil Random Effect/Husman Test ……... L-4
4. Hasil Regresi Linier Berganda Fix Effect Model ……. L-5
5. Hasil Pengujian Multikolinieritas ……. L-6
6. Hasil Pengujian Heterokedastisitas ……... L-8
7. Hasil Pengujian Autokorelasi …… L-9
8. Hasil Individual Effect Model Panel Data …… L-10
9. t-Tabel Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80) ……. L-11
10. F Statistik Tabel ……..... L-12
11. Nilai Table Kritis Chi-Square ……... L-13
12. Analisis Statistik Deskriptif …….. L-14

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi dan tidak dapat terlihat secara mudah hanya dari suatu angka absolut. Kemiskinan juga merupakan menu utama yang tersaji, khususnya di Negara berkembang, menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara, kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Secara teori kemiskinan dapat dikatakan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarga seperti makan, minum, tempat berlindung, pakaian, pendidikan dan kesehatan (Sukirno, 2010). Masalah mutidimensi ini membuat masalah kemiskinan menjadi suatu masalah yang tertuang kepada segala aspek dimensi baik sosial, ekonomi dan lingkunga. Beberapa peneliti terus menyelesaikan paradigma kemiskinan yang terjadi dengan berbagai kajian-kajian keruangan dalam literatur, (Sen, 1976) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan tetapi juga terdiri dari berbagai dimensi yang bersama-sama membentuknya konsep kemiskinan, dengan kata lain seseorang tidak miskin hanya karena dia tidak miskin memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, ia miskin karena peluangnya untuk keluar dari kemiskinan berkurang karena kurangnya pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup.

Dengan indikator yang lebih kongkrit, kemiskinan menurut Sach dalam Amir (2007) ditandai atau tidak dimilikinya: (1) *human capital* (kesehatan, pendidikan dan nutrisi yang baik); (2) *bussines capital*; (3) *infrastructure* (jalan, listrik, air bersih, sanitasi, perlindungan lingkungan dan sarana publik lainnya); (4) *natural capital*; (5) *public institutional capital* (administrasi public yang dikelola dengan baik, sistem pengadilan yang bersih dan polisi yang baik); dan (6) *knowledge*

capital (modal ilmu pengetahuan). Permasalahan yang tidak bisa dihindari oleh suatu daerah, tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan-pelayanan tentu sangat tinggi karena sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduknya dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya kajian dan analisis penanggulangan yang akurat, hasil kajian mendalam yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar $2 dollar AS per kapita per hari. Artinya, penduduk yang dianggap miskin disemua negara di dunia ini adalah penduduk yang memiliki pengeluarannya kurang dari $2 per hari. Dalam konteks Indonesia, ukuran yang umum digunakan adalah batas garis kemiskinan *(poverty line).* Batas garis kemiskinan adalah besarnya pengeluaran yang mampu memenuhi kecukupan 2100 kalori per kapita per hari untuk kebutuhan minimum bukan makanan seperti perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan dan angkutan (Priebe, 2014). Dalam praktiknya, BPS juga mengelompokkan tipologi kemiskinan di perdesaan dan diperkotaan. Di daerah pedesaan indikatornya semisal: (1) miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (2) miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun; dan (3) paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Sementara di daerah perkotaan: (1) miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (2) miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun; dan (3) paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 kg nilai tukar beras perorang per tahun.

Wilayah Perkotaan yang semakin tumbuh dan berkembang juga menyebabkan berkembangnya heterogenitas yang menunjukkan perbedaan sosial penduduknya (Mc Gee, 1995). Heterogenitas tersebut selanjutnya lebih jelas terlihat dari adanya

sektor formal dan informal perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan antara kelompok penduduk berdasarkan perbedaan ekonomi dan sosial penduduknya. Kegiatan ekonomi formal di perkotaan tidak mampu menyerap pekerja dengan pendidikan dan kemampuan rendah, sehingga pekerja dengan produktivitas rendah bekerja pada sektor informal (Lacabana dan Cariola, 2003). Selain itu, adanya permukiman kumuh dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan (slum area) di perkotaan.

Beberapa temuan dalam masalah kemiskinan perkotaan memiliki hasil yang beragam, (Pitri Yandri, 2018), Pada kasus orang miskin dapat dijelaskan kecenderungan menabung (*marginal propensity to saving*) MPS=0 dan kecenderungan mengonsumsi (*marginal propensity to consume*/MPC) mendekati 1, karena pendapatan yang diperoleh hampir semuanya digunakan untuk konsumsi. Dalam perspektif makroekonomi, fenomena ini cukup dapat menjelaskan persoalan mengapa di setiap negara yang jumlah penduduk miskinnya banyak mengalami kesulitan dalam membentuk akumulasi kapital. Sharp, et.al (1996) dalam Kuncoro (2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Masalah kemiskinan provinsi tidak terlepas dari berbagai aspek-aspek di setiap wilayah, pada penelitian ini masalah kemiskinan dikaji pada wilayah provinsi di pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan

dibawah garis kemiskinan. Berikut adalah gambaran jumlah penduduk miskin 10 provinsi di Pulau Sumatera :

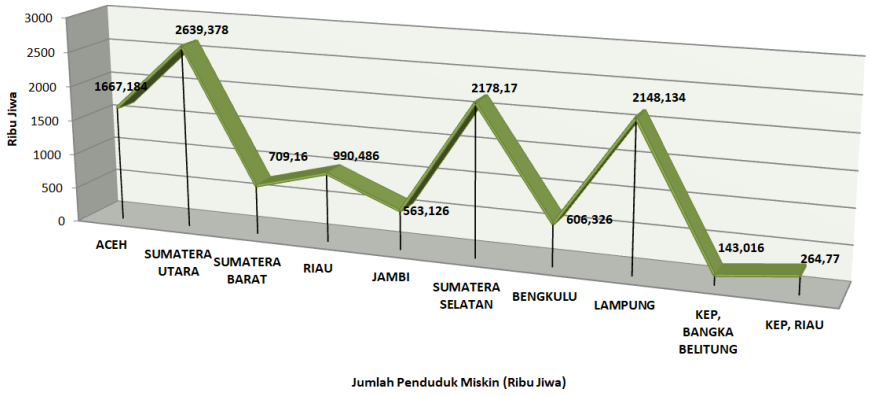

Gambar 1. Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa).

Berdasarkan Gambar 1, rata-rata Jumlah Penduduk Miskin 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 yang tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara dengan rata-rata sebesar 2639,378 ribu jiwa, Sumatera Selatan sebesar 2178,17 ribu jiwa dan Lampung sebesar 2148,314 ribu jiwa, sedangkan untuk wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah wilayah Bangka Belitung sebesar 143,016 ribu jiwa dan kepulauan riau sebesar 264,77 ribu jiwa.

Ritonga (2003) Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah hal yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kemiskinan merupakan fenomena yang komplek baik dari sisi pendapatan masyarakat individu maupun pengeluran masyarakat dari penemuan dari kajian. Perkotaan diduga memiliki kantong-kantong kemiskinan yang kuat.. kemiskinan di kota pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan kemiskinan yang terjadi di desa. Perbedaannya terletak pada penyebab dari faktor-faktor tersebut. Misalnya faktor ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, dan tingginya biaya hidup.

Hubungan yang signifikan antara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu dan secara simultan bahwa terdapat hubungan yang ‘sangat kuat” antara PNPM – MP dengan penaggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu sedangkan secara Parsial PNPM – MP dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Kotamobagu hanya pembanguan Infrastruktur dan Sosial yang sangat berpengaruh sedangkan ekonomi tidak berpengaruh (A. Madjid dkk, 2015).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan konsep yang saling berpengaruh, dalam konsep klasik pembangunan diartikan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dapat membantu dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Salcatore (2008) berpendapat bahwa ada pengaruh positif langsung antara pertumbuhan pembangunan manusia yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memegang peranan penting dalam jalur pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi IPM suatu daerah, biasanya semakin baik pertumbuhan ekonominya dan semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, biasanya tingkat kemiskinan di daerah tersebut semakin menurun.

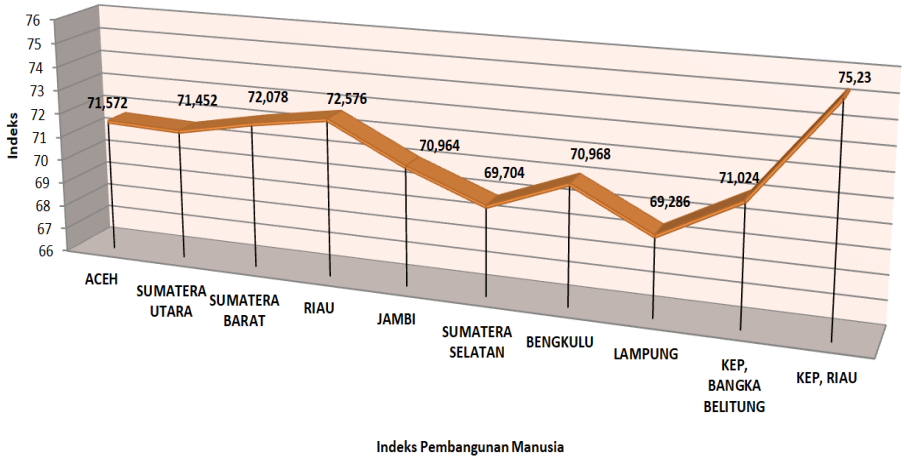

Gambar 2. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia 10 Provinsi di Pulau Sumatera 2017-2021

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia tertinggi 10 Provinsi di pulau Sumatera tahun 2017-2021. Pembangunan manusia merupakan suatu komponen penting dalam pembentukan modal manusia setiap wilayah. Pada data angka kisaran rata-rata indeks pembangunan manusia di

wilayah-wilayah Sumatera berada pada angka 70,3 wilayah dengan angka tertinggi mencakup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,23, Provinsi Riau 72,576 dan Provinsi Sumatera Barat 72,028, sedangkan nilai angka yang paling rendah hanya pada 2 wilayah yaitu Provinsi Lampung sebesar 69,286 dan Provinsi Sumatera Sealatan sebesar 69,704. Indeks pembangunan manusia ini adalah hasil dari beberapa komponen yaitu angka kesehatan, harapan lama sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan. Pada wilayah-wilayah di pulau sumatera indeks pembangunan manusia masih tergolong pada tingkatan indeks pembangunan manusia yang sedang, hal ini juga masih memiliki suatu hubungan dengan tingkat kemiskinan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Studi empiris Singh (2012) dengan jelas mengungkapkan bahwa IPM dan pendapatan per kapita memiliki pengaruh besar terhadap pengurangan kemiskinan. Pengaruh IPM dan pendapatan per kapita terhadap pengentasan kemiskinan ditemukan signifikan dan dampak IPM terhadap kemiskinan adalah negatif. Lebih lanjut, penelitian Arief dan Pratiwi (2017) menyimpulkan bahwa indikator IPM memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan secara statistik. Dalam beberapa penelitian tentang peretasan kemiskinan ketimpangan pendapatan memiliki peran dalam kasus kemiskinan yang ada, Lin (2003) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Tiongkok selama 1985-2001 tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dalam efektivitas pengentasan kemiskinan. Kakwani (2001) dan Son (2007) menunjukkan bahwa elastisitas ketimpangan selalu positif, dimana penurunan ketimpangan juga mengurangi kemiskinan.

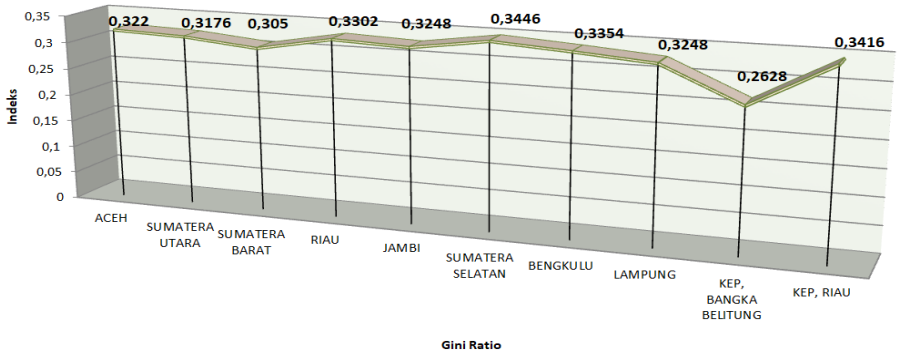

Gambar 3. Rata-rata Gini Ratio 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 3, rata-rata gini ratio 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021. Secara keseluruhan wilayah-wilayah Sumatera masuk kedalam tinggat ketimpangan pendapatan yang sedang ini terlihat dari rata-rata nilai yang berkisar 0,3. Dalam gambar tersebut nilai angka gini ratio yang paling tinggi terdapat 3 wilayah yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,3446, Provinsi Kepulauan Riau 0,3416 dan Provinsi Bengkulu 0,3354 namun nilai kisaran angka ini masih kedalam kategori ketimpangan yang sedang. sedangkan rata-rata gini ratio terendah adalah Provinsi Bangka Belitung yang menyentuh angka sebesar 0,2628. Tetapi hal berbeda telah di temukan bahwa dengan tingkat ketimpangan yang cenderung sedang wilayh-wilayah Sumatera masih memiliki angka tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi.

Penelitian tentang ketimpangan pembangunan dan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan oleh Yusuf et al. (2014); Akhmad (2015); Gitting (2015); Mahardiki dan Santoso (2013); Nurhuda di al. (2012) di Jawa Timur Baransano at.al (2016) di Papua Barat; Barika (2012) di Provinsi Bengkulu; mengatakan telah terjadi ketimpangan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di dalam daerah. Oleh karena itu, pengembangan sektor unggulan masing-masing daerah harus ditingkatkan di masing-masing daerah, sehingga dapat memacu pertumbuhan daerah dan pada akhirnya dapat mempercepat pengurangan dan kesenjangan serta kemiskinan. Hal ini penting karena dengan mengurangi ketimpangan pembangunan bertujuan untuk mengurangi tingkat utang di daerah. Kakwani (2001) dan Son (2007) menunjukkan bahwa elastisitas ketimpangan selalu positif, dimana penurunan ketimpangan juga mengurangi kemiskinan.

Kesenjangan antar daerah tetap harus dikurangi, salah satu prinsip mendasar yang harus dipegang teguh oleh pembuat kebijakan adalah kesenjangan ekonomi antar daerah masih dapat ditoleransi sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak menimbulkan ketimpangan pendapatan yang luar biasa di masyarakat. Dengan kata lain, upaya untuk mendistribusikan kembali keuntungan rakyat harus diberikan atas prioritas di atas redistribusi ekonomi regional. Satu hal lagi yang harus dilakukan dalam upaya mengurangi

kesenjangan keuangan antar daerah adalah meminimalkan jarak antara daerah yang paling makmur dan daerah yang paling tertinggal, melalui upaya individu untuk meningkatkan daerah yang paling kekurangan secara signifikan. Berkurangnya gap perekonomian atau distribusi pendapatan akan mampu membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada pada berbagai daerah.

Pengertian tentang pentingnya peran ketenagakerjaan dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan antara lain didasarkan pada argumen Jonaidi (2012) dan Awandari & Indrajaya (2016), bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya menyediakan banyak lapangan kerja. Jonaidi (2012) menjelaskan bahwa kesempatan kerja memegang peranan penting dalam pengaruh ekonomi pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan. Tenaga kerja memiliki hubungan yang erat dalam tinggkat pengangguran, dimana suatu wilayah harus mampu menyerap tenaga kerja sebagai bentuk dari mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Berikut adalah gambaran tingkat pengangguran pada 10 Provinsi di Pulau Sumatra:

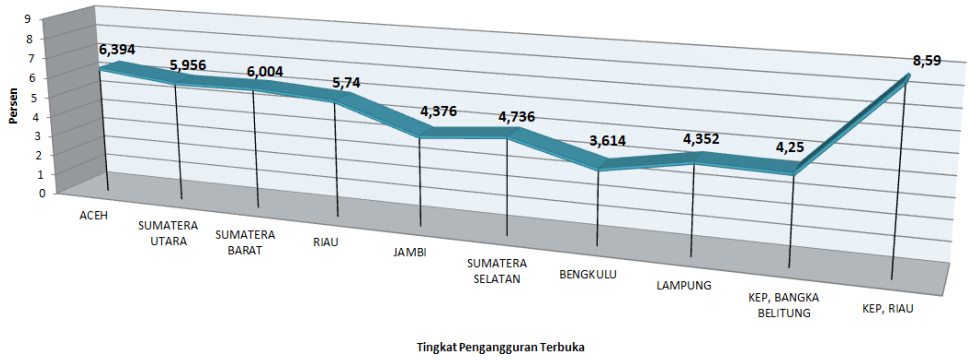

Gambar 4. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021

Gambar 4, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat Pengangguran Terbuka Terbuka dari tahun 2017-2021. Tingkat pengangguran merupakan salah satu variabel penting dalam kasus kemiskinan yang ada pada wilayah-wilayah di Pulau Sumatera. Pada wilayah-wilayah provinsi di Pulau Sumatera beberapa tingkat pengangguran yang paling tinggi mencakup wilayah Provinsi Kepualauan Riau sebesar 8,59%, Provinsi Aceh 6,394% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,004, sedangkan untuk wilayah dengan tingkatan yang rendah mencakup

Provinsi Bengkulu sebesar 3,614%, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,25% dan Provinsi Lampung sebesar 4,352%.

Pengangguran memiliki dampak yang merugikan yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan seseorang akibat berkurangnya pendapatan. Menurunnya kesejahteraan masyarakat karena tidak adanya pendapatan akan memberikan peluang peningkatan kemiskinan. Besar kecilnya kemiskinan di suatu daerah dapat dilihat atau diketahui dengan menggunakan sejumlah alat ukur yang biasa disebut indikator kemiskinan, yaitu: pendapatan atau konsumsi per minggu/bulan/tahun, aset, total kekayaan, makanan yang dikonsumsi, tempat tinggal, pendidikan formal, prasarana dasar rumah tangga, dan kesehatan, Sukirno S .(2014) dan Tambunan T .(2015). Namun, literatur terbaru tentang masalah ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi makro mempengaruhi kemiskinan secara nonlinier. Ayala dkk. (2011) menemukan bahwa pengangguran mempengaruhi kemiskinan secara asimetris selama periode resesi dan ekspansi ekonomi. Saleem dkk. (2019) menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensi secara signifikan lebih banyak di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Sebuah studi baru-baru ini dilakukan oleh Meo et al. (2018a, b) juga menyatakan bahwa berbagai variabel makroekonomi termasuk pengangguran mempengaruhi kemiskinan secara asimetris.

Dalam kajian ini beberapa peran variabel makroekonomi diuji dalam masalah kemiskinan di Pulau Sumatera dengan mengambil beberapa variabel penting yang harus dikaji ulang dalam masalah kemiskinan, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Maka penulis tertarik untuk meniliti kajian dengan judul “Determinan kemiskinan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera?

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera?
3. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatra.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatra.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatra.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dinilai dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

BPS mendefinisikan kemiskinan dengan dua cara yaitu ukuran pendapatan dan ukuran non pendapatan. Ukuran pendapatan adalah kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan/pengeluaran individu untuk memenuhi konsumsi/kebutuhan pokok minimum masyarakat. Batas pemenuhan kebutuhan minimum mengacu pada rekomendasi Widyakarya Nasional dan Gizi tahun 1978, yaitu nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2100 kilo kalori per orang

setiap hari. Sedangkan ukuran non pendapatan adalah rendahnya tingkat konsumsi/akses masyarakat kepada pelayanan dasar seperti: (1) perumahan; (2) pendidikan; (3) pelayanan kesehatan; (4) fasilitas sanitasi dan layanan air bersih; dan (5) keterbatasan terhadap akses pendanaan dan kapasitas usaha, dan lain-lain.

Pengertian kemiskinan yang saat ini popular dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang sering kali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Dimana Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik (Sholeh, 2010). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (BPS, 2009).

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: 1) kemiskinan absolut: bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bias hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3) kemiskinan kultural: mengacu pada peersoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor

budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; (4) kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sisoal politik yang tidak mendukunh pembebasan kemiskinan dan seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan (BPS,2009).

2. Ukuran Kemiskinan

Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar $2 dollar AS per kapita per hari. Artinya, penduduk yang dianggap miskin disemua negara di dunia ini adalah penduduk yang memiliki pengeluarannya kurang dari $2 per hari. Penentuan garis kemiskinan sebesar 2 dollar AS per kapita per hari didasarkan pada garis kemiskinan 75 negara (*lessdevelopedcountries dan developing countries*) yang dikumpulkan oleh Bank Dunia sepanjang tahun 1990-2005. Sebagian besar garis kemiskinan tersebut ditentukan dengan menggunakan metode penghitungan yang sama, yakni metode biaya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Untuk menghitung garis kemiskinan internasional, Bank Dunia mengkonversi garis kemiskinan 75 negara tersebut yang dinyatakan dalam mata uang masing-masing negara ke dollar AS (BPS, 2009:16).

Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non-makan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antar wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis ukuran penduduk, ukuran ini sering disebut juga dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan maka dinyatakan dalam kondisi miskin.

Mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.Sumber data yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan BPS setiap tahun. Metode pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada Garis Kemiskinan (GK), sehingga mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Survey BPS sosial ekonomi rumah tangga, memiliki komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun enurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein. (b) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. (c) Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air. (d) Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku). (e) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

Pendekatan yang umum dipakai dalam mengukur kemiskinan adalah pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Kebutuhan dasar diukur dari pengeluaran rumah tangga atas sejumlah komoditas baik berupa komoditas makanan maupun non makanan. Dari sejumlah komoditas terpilih tersebut kemudian ditentukan ukuran kebutuhan minimumnya. Kemudian jumlah minimum komoditas tersebut dikalikan dengan harga komoditas yang bersangkutan. Dengan begitu diperoleh sejumlah angka yang menunjukan harga dari bundel komoditas minimum yang diperlukan. Angka itulah yang kemudian dijadikan sebagai batas atau garis (*poverty line*) yang membagi penduduk miskin dan penduduk tidak miskin (Yohandarwati, 2015).

BPS memberikan 14 kriteria yang menjadikan sebagai indikator keluarga miskin sebagai berikut; (1) luas lantai banguna tempat kurang dari 8 $m2$ perorang. (2)

jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. (3) jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. (5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. (6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai. (7) bahan bakar untuk memasak sehari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. (8) hanya mangkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. (9) hanya membeli satu set pakaian dalam setahun. (10) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. (11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. (12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,00 perbulan. (13) pendidikan tertinggi kepala keluarga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD dan hanya SD. (14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual, seperti; sepeda motor, (kredit atau non kredit), emas, ternak, atau barang modal lainnya.

Indikator tersebut sifatnya multidimensi, artinya setiap keluarga fakir miskin dapat bebeda tingkat kedalaman kemiskinan.Semakin banyak kriteria yang terpenuhi semakin fakir keluarga tersebut dan harus diprioritaskan penanganannya.

3. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari orang miskin itu sendiri. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; penyebab subbudaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain; termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil struktur sosial.

Menurut Nizar, Hamzah, and Syahnur (2013) banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga miskin. Kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab yaitu: (a) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki. (b) Rendahnya derajat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. (c) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan.Selama ada lapangan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkungan kemiskinan tersebut. (d) Kondisi terisolasi. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi.Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Menurut Sharp (Sri, 2010) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses modal.

B. Indeks Pembangunan Manusia

1. Pengertian Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 memperkenalkan konsep pembangunan manusia (*human development*) sebagai paradigma pembangunan model baru. Memperluas pilihan bagi manusia, yang dapat dilihat dari usaha kearah perluasan pilihan, dan sebagai taraf yang dicapai dalam upaya tersebut. Pembangunan manusia dapat diartikan juga sebagai

pembangunan kemampuan manusia dengan cara meningkatkan kesehatan, pengetahuan, serta keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan manusia itu sendiri. *United Nations Development Programme* (1995) mengenalkan konsep penting dalam pembangunan manusia, antara lain sebagai berikut:

1) Empat pilar pokok pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
2) Pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan (kapasitas manusia) serta memanfaatkan kemampuan/kapasitas yang dimiliki manusia itu sendiri secara optimal.
3) Manusia sebagai pusat pembangunan
4) Pembangunan manusia sebagai dasar dari tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya
5) Tujuan pembangunan sebagai perluasan pilihan bagi manusia dan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan mereka saja tetapi pembangunan manusia secara komprehensif.

Dalam *Human Development Report* (1995) *United Nations Development Programme* (UNDP) memperjelas bahwa dalam memperluas pilihan manusia, konsep pembangunan manusia dibangun dari empat unsur pokok, antara lain yaitu:

a) Pemerataan

   Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan yang ada dalam hal ekonomi maupun politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada.
b) Produktivitas

   Masyarakat sebaiknya mampu meningkatkan produktivitas serta ikut dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Maka pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.
c) Pemberdayaan

Pembangunan dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses-proses dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

d) Kesinambungan

Upaya dalam memperoleh kesempatan seharusnya bisa menjamin tidak hanya diperuntukan pada generasi sekarang akan tetapi untuk generasi mendatang. Segala jenis pemodalan baik itu manusia, fisik, maupun lingkungan hidup sebaiknya harus dipenuhi secara seimbang.

1.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM atau HDI mulai diperkenalkan dan dikembangkan oleh *United Nations Development Programe* (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Biro Pusat Statistik dan UNDP, 1997). HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

1.2 Teori Pembangunan Manusia

Human capital secara bahasa tersusun atas dua dasar yaitu manusia dan kapital (modal). Kapita diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dalam human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi dan transaksi.

Seiring berkembangnya teori ini, konsep *human capital* dapat didefinisikan menjadi tiga konsep. Konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek individu. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi (2002) yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki manusia. Konsep kedua menyatakan bahwa *human capita*l merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan suatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu (Alan dkk, 2008). Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia. Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Romer (1999) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktivitas ekonomi. *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktivitasnya (Rosen, 1999). Frank & Bemanke (2007) berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang mempengaruhi produktivitas manusia.

Human capital dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktivitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan *human capital*. Pendidikan dan pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga produktivitas juga akan meningkat. Todaro (2000) mengungkapkan bahwa *human capital* dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan makan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Sementara itu, kesehatan merupakan bidang yang saling terkait dengan pendidikan. Pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktivitas. Sementara itu, pendidikan yang tinggi juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

1.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Usia Hidup

   Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live births*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

b. Pengetahuan

   Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan 2 indikator yaitu rata-rata lama sekolah (*mean year schooling*) dan angka melek huruf.angka rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Proses perhitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberi bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga. Untuk penghitungan indeks, batas maksimum untuk angka melek huruf dipakai 100 dan minimum 0 (nol), yang menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis dan 0 mencerminkan sebaliknya.

c. Standar Hidup Layak

Angka standar hidup layak bisa menggunakan indikator GDP perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) atau menggunakan indikator rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan (*adjusted real per capita expenditure*). Konsep pembanguna mansuia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100,0 dengan kategori sebagi berikut:

1. Tinggi : IPM lebih dari 80,0
2. Menengah Atas : IPM antara 66,0 - 79,9
3. Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 75,9
4. Rendah : IPM kurang dari 50,0

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

1.4 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisis indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

1. Tingkat kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{I_{kesehatan}} = \frac{\boldsymbol{AHH - AHH_{min}}}{\boldsymbol{AHH_{maks} - AHH_{min}}}$$

2. Tingkat pendidikan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan RataRata Lama Sekolah (RLS), dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{I_{AMH}} = \frac{\boldsymbol{AMH - AMH_{min}}}{\boldsymbol{AMH_{maks} - AMH_{min}}}$$

$$\mathbf{I_{RLS}} = \frac{\boldsymbol{RSL - RLS_{min}}}{\boldsymbol{RSL_{maks} - RSL_{min}}}$$

$$\boldsymbol{I}_{\mathbf{Pendidikan}} = \frac{\boldsymbol{I_{AMH} - I_{RLS}}}{\mathbf{2}}$$

3. Indeks layak hidup diukur dengan tingkat pengeluaran.

$$\mathbf{I_{Pengeluaran}} = \frac{\boldsymbol{In(pengeluaran) - In(pengeluaran_{min})}}{\boldsymbol{In(pengeluaran_{maks}) - In(pengeluaran_{min})}}$$

Rumusan umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)

Dimana:

X_1 = Indeks kesehatan

X_2 = Indeks pendidikan

X_3 = Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusan dapat disajikan sebagai berikut:

$$\mathbf{IPM} = \frac{\boldsymbol{X_{(i)} - X_{(i)min}}}{\boldsymbol{X_{(i)maks} - X_{(i)min}}} \boldsymbol{X\ 100}$$

Dimana:

X(i) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)

X(i)maks : Nilai maksimum X(i)

X(i)min : Nilai minimum X(i)

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator X(i) disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM	Nilai Minimun	Nilai Maksimum	Catatan
Angka Harapan Hidup (Tahun)	25	85	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf (Persen)	0	100	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	0	15	Sesuai standar global (UNDP)
Daya Beli (Rupiah PPP)	300.000	732.720	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber: http://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunanmanusia.htm#subjekViewTab2.BPS

1.5 Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Tingkat Kemiskian

Teori pertumbuhan baru menekankan akan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Dapat dilakukan dengan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan

mendapat hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan akan memberikan upah yang lebih tinggi pada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian karena tenaga kerja mampu meningkatkan hasil pertanian karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya yang memiliki produktivitas tinggi akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, di perlihatkan melalui adanya peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2007).

C. Ketimpangan Pendapatan

Pengertian umum pendapatan diartikan sebagai hasil pencarian usaha atau hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi (Boediono, 1992). Pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi (Winardi, 1992). Hasil tersebut diharapkan menjadi kapabilitas yang berguna (*capabilities to funtion*) (Todaro, 2006), berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan individu. Pendapatan menjadi indikator yang diharapkan dapat menentukan ukuran kondisi ekonomi individu.

Teori yang diungkapkan Simon Kuznets yang menjelaskan siklus distribusi pendapatan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (tidak merata), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan pada fase selanjutnya cenderung membaik (ketidakmerataan menyusut). Namun dalam pemahaman ekonomi kontemporer teori yang diungkapkan Kuznets tersebut tidak begitu dapat menjelaskan kondisi sesungguhnya karena meskipun siklus itu terjadi semua tetap tergantung pada proses pembangunan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan (Todaro, 2006).

Kondisi ketimpangan pendapatan menyebabkan perbedaan pendapatan yang terjadi karena perbedaan dalam kepemilikan sumberdaya alam dan faktor produksi terutama kepemilikan modal. Keadaan suatu wilayah mempunyai pengaruh yang

besar untuk terciptanya pola pembangunan ekonomi, ketidaksamaan ini berpengaruh terhadap kemampuan untuk berkembang yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh dengan lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pendapatan maupun pembangunanyang terjadi di Indonesia.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah dengan Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang diukur dengan membandingkan luas yang dibentuk antara diagonal dan Kurva Lorenz (distribusi pendapatan) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Daimon dan Thorbecke (1995) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. 1) variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastissebagai akibat krisis. 2) merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan. Dalam Kurva Lorenz, garis diagonal merupakan penjelasan dari kemerataan distribusi pendapatan di setiap titik pada garis diagonal tersebut menujukkan presentase penduduk yang berada di suatu wilayah yang sama dengan presentase penerimaan pendapatan (Sugianto, Mulya, & Seleky, 2015).

Indeks Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan kemerataan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang persis sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna (*complete inequality atau perfectly inequal*), dimana seluruh penduduk terpusat di wilayah tertentu. Jadi, semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin besar pula kemungkinan ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi (sumber: http://sirusa.bps.go.id).

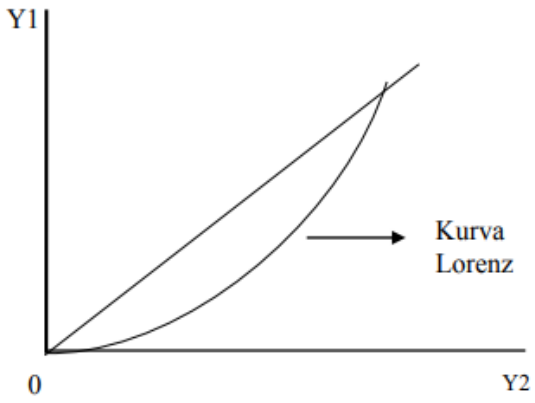

Sumber : Hudiyanto 2014
Gambar 5
Kurva Lorenz

$$GR = 1 - \sum_{i-1}^{n} f_{pi} x (fc_i + fc_{i+1})$$

Keterangan :

GR : Koefisien Gini
Fbi : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
Fci : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas ke-1
Fci-1 : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1

1. Hubungan Ketimpangan Pendapatan dengan Tingkat Kemiskinan

Berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan, terutama di negara yang sedang berkembang. Melalui pembahasan mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pembangunan pedesaan, pendidikan, pengangguran, dan sebagainya. Cara yang sederhana untuk mendekati masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan yaitu dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi (Lincoln Arsyad, 1997).

Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Bertambahnya penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi masyarakat yang sangat miskin. Sebagian keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian berada di bawah garis kemiskinan, seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2000).

D. Pengangguran

5. Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2016). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2013) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2003). Tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pencarian pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka adalah menggembirakan jika pencarian itu berakhir, dan orang-orang yang menuggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas keseimbangan merasa senang ketika lowongan terbuka. (Sukirno, 2016).

Angkatan kerja meliputi populasi dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasukdalam golongan menganggur. Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15 sampai 64 tahun. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi (Sukirno, 2013).

Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan. Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang

diinginkannya. Maka menurut sebab terjadinya, pengangguran menurut Sukirno (2016) digolongkan kepada tiga jenis yaitu:

a. Pengangguran friksional

   Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional tidak bisa dielakkan dari perekonomian yang sedang berubah. Untuk beberapa alasan, jenis-jenis barang yang dikonsumsi perusahaan dan rumah tangga bervariasi sepanjang waktu. Ketika permintaan terhadap barang bergeser, begitu pula perminttan terhadap tenaa kerja yang memproduksi barang-barang tersebut.

b. Pengangguran struktural

   Pengangguran struktural terjadi karena ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan ketrampilan baru tersebut.

c. Pengangguran konjungtur.

   Pengangguran konjungtur terjadi karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat.

Sukirno (2016), mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok:

a. Pengangguran Terbuka

   Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karena

dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalakan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

c. Setengah Menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

d. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabial dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

Dalam membicarakan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentasi dari angkatan kerja (Sukirno, 2016). Untuk melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari tingkat pengangguran terbuka ialah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,

yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada (BPS, 2010).

Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagi persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \text{ x } 100$$

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan.Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal da nada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. (Dharmayanti, 2011).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang digolongkan setengah penganguran (*underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan, serta mereka yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (*severely underemployment*) bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu. Menurut BPS (2010), Pengangguran terbuka terdiri atas:

a. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
b. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha
c. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan

d. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada geerasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderung mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja disektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama. Tidak tertutup kemungkingan mereka berusaha mencari pekerjaan itu di kota atau di provinsi atau daerah yang kegiatan industry telah berkembang. Ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah yang kegiatan industry atau sektor modern telah berkembang (Kuncoro, 2006).

Sebaliknya angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian. Apalagi tingkat pendidikan di daerah tersebut rendah. Pada umumnya, mereka yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupan. Bila sektor pertanian kurang dapat menjamin kelangsungan hidup, mereka bersedia berusaha di kantor informal. Mereka tidak memperdulikan apakah jam kerja panjang atau penghasilan rendah. Bagi mereka yang penting dapat bertahan hidup. Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu: (Sukirno, 2016)

a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :
   1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan pendapatan

potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesinmesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:
   1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.
   2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
   3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

1.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskian

Terhadap hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan yang ditak merata. Salah satu faktor penting yang melakukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat akan mencapai titik maksimum apabila

tingkatpenggunaan tenaga kerja penuh dapt diwujudkan. Terjadinya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat dan akan berakhir pada kemiskinan (Sukirno, 2008).

Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk pada pemerataan distribusi pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak akan dapat memperoleh pendapatan. Maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Ditinjau dari segi mikro, apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan. Kedua, pengangguran mempunyai kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan. Masalah tersebut sabgatlah erat hubungannya dengan masalah kemiskinan.

E. Tinjauan Empiris

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
1	The Effect Of Village Funds, Human Development Index (HDI), And Economic Growth On Decrease Of Poverty Level In North Sumatera Province Lestari Sihite, Murni Daulay, Irsyad Lubis Tahun 2020	Metode: Ordinary Least Square (OLS) Variabel: 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Indeks Pembangunan Manusia 3. Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh tidak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar -1,66. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dengan koefisien nilai -0,53. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 1,05.
2	A Modified Human Development Index And Poverty In The Villages Of West Seram	Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data	Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa indikator IPM dan rasio

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
	Regency, Maluku Province, Indonesia Amaluddin, Rukmuin W. Payapo, Abdul A. Laitupa, Mohammad R. Serang Tahun 2018	Variabel: 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Indeks Pembangunan Manusia 3. Pengeluaran Perkapita 4. Angka Harapan hidup 5. Rata-rata Lama Sekolah	ketergantungan berpengaruh terhadap kemiskinan secara statistik. Secara parsial, semua variabel berpengaruh terhadap kemiskinan pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa pengaruh semua indikator IPM terhadap kemiskinan adalah negatif dan variabel rasio ketergantungan memiliki hubungan yang positif.
3	The effect of education and unemployment on poverty in East Java Province, 2011-2016 L O Mardiyana dan H M Ani Tahun 2018	Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data Variabel: 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Tingkat Pendidikan 3. Tingkat Pengangguran	(1) variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, (2) variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, (3) variabel pendidikan dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pendidikan dan pengangguran mempengaruhi kemiskinan sebesar 96,6% sedangkan sisanya 3,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Pemerintah

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			disarankan untuk dapat memberikan lapangan kerja lebih banyak dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang masih menganggur agar memiliki keterampilan dan mampu membuka usaha sendiri.
4	The Impact of Unemployment and Human Development Index on Poverty in Gorontalo Province 2008-2017 Lian A. Yusuf , Sri Indriyani Dai Tahun 2020	Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data Variabel: 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Tingkat Pengangguran 3. Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat pengangguran berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo. indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
5	The Effect Of Economic Growth And Income Inequality On Poverty In Indonesia Akhmad, Alyas, Amir Tahun 2018	Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data Variabel: 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Gini Ratio 4. Indeks Pembangunan Manusia	Dari hasil analisis regresi ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan variabel indeks Gini terhadap peningkatan kemiskinan. Artinya, setiap peningkatan ketimpangan pendapatan (Gini index) yang terjadi di Indonesia, dapat menyebabkan peningkatan utang di Indonesia. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan.

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			Sementara itu, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdampak negatif namun tidak nyata terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan PDB dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
6	Economic Growth, Income Inequality, and Poverty in Central Sulawesi Suparman , Muzakir , Wahyuningsih , Mukhtar Tallesang Tahun 2021	Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data Variabel: 1. Jumlah Penduduk Miskin 2. PDRB 3. Gini Ratio	Berdasarkan temuan empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya variabel pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan ketimpangan (GINI), dimana jika terjadi peningkatan ekonomi pertumbuhan, maka akan menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan antara orang-orang di daerah setempat. Gini ratio berpengaruh negative signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
7	Analysis Of The Effect Of Gross Regional Domestic Product, Number Of Population, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, And Human Development Index On Poverty In 2010-2020 East Java Province Nur Ahmar Fajriah Tahun 2021	Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data Variabel: 1. Jumlah Penduduk Miskin 2. PDRB 3. IPM 4. UMR	hasil penelitian variabel PDRB, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, perkembangan PDRB, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka harus diperhatikan untuk mengatasi masalah kemiskinan
8	Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi-Indonesia Andi Ika Fahrika , Hasni Salam , Muhammad Abdi Buhasyim Tahun 2020	Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data Variabel: 1. Jumlah Penduduk Miskin 2. IPM 3. Tingkat Pengangguran 4. Realisasi Investasi	IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan besarnya pengaruh sebesar 83,4% dan terdapat hubungan negatif. Selain itu, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan besaran pengaruhnya sebesar 54,1% serta terdapat hubungan yang positif. Nilai ini cukup besar yang menunjukkan bahwa ketika pengangguran meningkat satu persen maka kemiskinan juga akan meningkat sebesar 54,1% persen, dan sebaliknya ketika

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			pengangguran berkurang satu persen maka kemiskinan juga akan berkurang sebesar 54,1 persen.
9	Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province Ferdinand Niyimbanira Tahun 2017	Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data Variabel: 1. Tingkat Kemiskinan 2. Gini Ratio 3. Pertumbuhan Ekonomi	Hasilnya telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan tetapi tidak mengurangi ketimpangan pendapatan. Sedangkan gini ratio/ ketimpangan pembangunan yang mengecil atau berpengaruh negative akan mengurangi tingkat kemiskinan. berimplikasi pada pembuat kebijakan untuk merancang strategi pengurangan ketimpangan pendapatan di Afrika Selatan.
10	Impact of Unemployment and Governance on Poverty in Pakistan: a Fresh Insight from Non-linear ARDL Co-integration Approach Muhammad Saeed Meo ,Bezon Kumar, Sumayya Chughtai, Vina Javed Khan, Muhammad Khyzer Bin Dost, Qasim Ali Nisar Tahun 2020	Metode: ARDL Variabel: 1. Tingkat Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran 3. Indeks Pemerintahan	Ditemukan bahwa guncangan positif dalam pengangguran memiliki efek hampir dua kali lipat pada kemiskinan daripada guncangan negatif. Alasan inti dari temuan ini adalah bahwa Pakistan adalah salah satu negara miskin, di mana pengangguran merupakan masalah utama. Selanjutnya, artikel ini juga menemukan bahwa kualitas pemerintahan/kualitas

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			kelembagaan juga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan dan ditegaskan bahwa perubahan positif dalam pemerintahan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemiskinan dibandingkan dengan perubahan negatif.

F. Kerangka Pemikir

Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Bertambahnya penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi masyarakat yang sangat miskin. Sebagian keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian berada di bawah garis kemiskinan, seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2000).

Teori pertumbuhan baru menekankan akan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Dapat dilakukan dengan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan mendapat hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan akan memberikan upah yang lebih tinggi pada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian karena tenaga kerja mampu meningkatkan hasil pertanian karena tenaga kerja

yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya yang memiliki produktivitas tinggi akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, di perlihatkan melalui adanya peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2007).

Pengangguran berdampak pada berkurangnya pendapatan dalam masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai titik maksimal bila penggunaan tenaga kerja penuh dapat tercapai. Pengangguran yang ada dalam masyarakat menghambat pendapatan masyarakat mencapai titik maksimal, dengan demikian menurunkan kemakmuran yang harusnya mampu dicapai. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Semakin banyak orang yang menganggu maka angka kemiskinan pun meningkat.

Menurut Sadono Sukirno dalam Nugroho (2015) dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat dimana dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur maka akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan selalu terjadi kekacauan politik dan sosial sehingga berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, karena semakin banyak masyarakat yang menganggur maka cenderung akan semakin banyak kemiskinan dalam masyarakat. Gini ratio, Pembangunan manusia dan tingkat pengangguran merupakan variabel kunci yang masih menjadi masalah berkelanjutan dalam hal tingkat kemiskinan yang ada di berbagai wilayah. Berdasarkan rangkuman kerangka diatas, maka kerangka pemikiran yang terbentuk adalah :

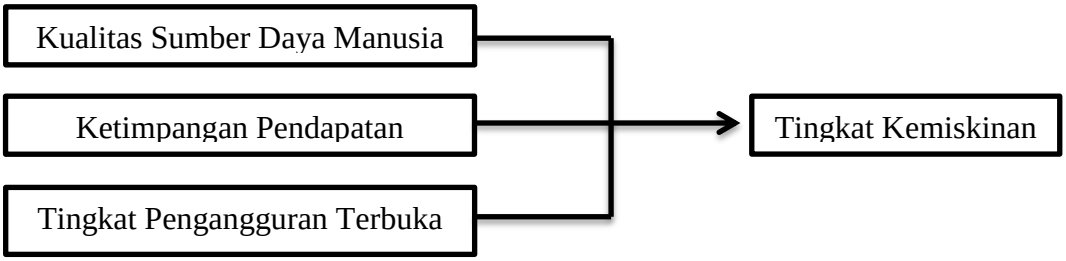

Gambar 6. Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah dan teori maka dapat dijelaskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatra.
2. Diduga Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatra.
3. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatra.

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis, Sumber data dan Variabel Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriftif kuantitatif pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Data yang digunakan adalah data sekunder, data ini diperoleh dari berbagai publikasi-publikasi, platform resmi dan berbagai buku kumpulan data. Penelitian ini menggunakan yaitu gabungan dari sebuah data antara runtun waktu 2017-2021, dengan menggunakan observasi wilayah atau (*cross section*) 10 Provinsi di Pulau Sumatera yaitu meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada setiap terbitan 10 Provinsi di Sumatera serta hasil publikasi lainnya.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Nama Variabel, Simbol, Satuan, dan Sumber Data

No	Variabel	Proksi	Simbol	Satuan	Sumber Data
1	Penduduk Miskin	Kemiskinan	K	%	Badan Pusat Statistik 10 Provinsi, website: https://www.bps.go.id/
2	IPM	Kualitas Sumber Daya Manusia	KSDM	Indeks	
3	Ketimpangan Pendapatan	Gini Ratio	GR	Indeks	
4	Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	%	

B. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat dan tempat variabel bebas adapun batasan atau definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. **Penduduk Miskin**

   Variabel Penduduk Miskin yang digunakan adalah Kemiskinan dalam satuan persen di 10 provinsi Pulau Sumatera tahun 2017-2021.

2. **Indeks Pembangunan Manusia**

   IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia Menggunakan satuan indeks di 10 provinsi Pulau Sumatera tahun 2017-2021.

3. **Ketimpangan Pendapatan**

   Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Variabel Ketimpangan Pendapatan menggunakan satuan gini di 10 provinsi Pulau Sumatera tahun 2017-2021.

4. **Pengangguran**

   TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja**.** Variabel TPT menggunakan satuan persen di 10 provinsi Pulau Sumatera tahun 2017-2021.

C. Regresi Linier Berganda dengan Panel Data

Model ekonometrika yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh Model dan Alat Analisis Regresi Linier berganda (OLS) dengan panel data menggunakan Eviews 9. Metode analisis yang dilakukan menggunakan data runtut waktu (time series) dari Tahun 2017-2021 dan data *Cross section* yang terdiri dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, maka digunakan model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut :

$$\mathrm{PPM_{it}} = \beta_0 + \beta_1 \mathrm{KSDM_{it}} + \beta_2 \mathrm{KP_{it}} + \beta_3 \mathrm{TPT_{it}} + \varepsilon_{it}$$

K	=	Kemiskinan
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
GR	=	Gini Ratio
TPT	=	Tingkat Pengangguran Terbuka
i	=	Observasi 10 Provinsi *(Cross section)*
t	=	Periode penelitian Tahun 2017-2021 (time Series)
β_0	=	Koefisien Konstanta intersep yang merupakan skalar
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	=	Koefisien regresi atau slop kemiringan dari masing-masing variabel
et	=	Standar error pada model matematis, *(Error Term)*

D. Pemilihan Model Data Panel

Pada dasarnya terdapat empat model yang digunakan dalam analisis data panel, yaitu *pooled least square, pooling independent cross sections over times, least square dummy variable (fixed effects),* dan *random effects.* Ketiga model tersebut dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut

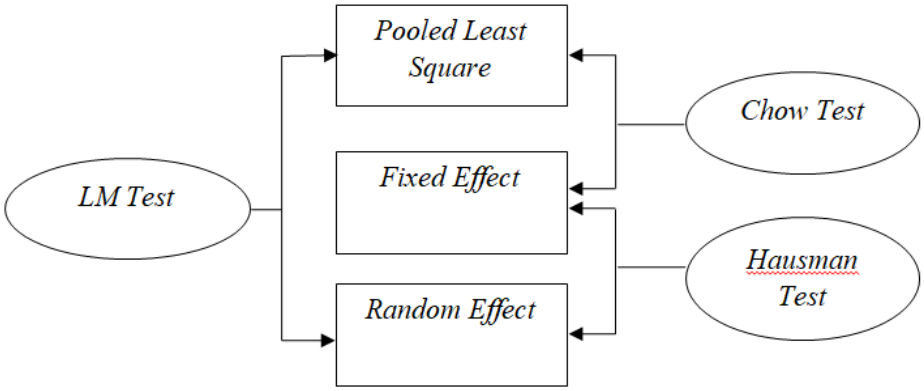

Gambar 7. Pemilihan Model Data Panel

1. Pooled Least Square (PLS)

Pada model ini diasumsikan bahwa semua koefisien konstan untuk semua silang tempat dan titik-titik waktu. Bentuk model umumnya adalah sebagai berikut :

$$y_{it} = a + X_{it}\beta + U_{it} \quad \text{i=1,...,N t=1,...,T,}$$

dimana i adalah negara, persuahaan, dan lain-lain dan t adalah waktu. Asumsi dari model di atas adalah intersep semuanya sama dan slope koefisien variabel X identik untuk semua tempat.

a. Pooling Cross Sections over Time

Model ini merupakan model *Pooled least square* dengan menambah variabel dummy. Bentuk modelnya adalah sebagai berikut :

$$y_{it} = a + X_{it}\beta + D_{time}U_{it} \quad \text{i=1,...,N t=1,...,T,}$$

Dtime menunjukan variabel dummy waktu yang biasanya dimulai dari urutan waktu yang kedua misalnya tahun kedua dan tahun pertama sebagai dasar (α).

2. Uji Chow /Fixed Effect

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* (FE) lebih baik daripada model regresi data panel *common effect* (CE) dengan melihat *residual sum squares*. Pendekatan ini digunakan untuk memperbaiki LSDV dimana unit *cross section* yang besar tidak akan mengurangi derajat kebebasan. Pendekatan *Fixed effect* ini mengijinkan adanya intersep yang berbeda antar individu namu intersep setiap individu tidak bervariasi sepanjang waktu. Pendekatan ini ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \cdots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

Dimana β_{0i} merupakan *intersep* dan β_1, β_2 merupakan *slope*. Adanya perbedaan intersep pada setiap unit cross section dilakukan dengan penambahan *subscript i*. Meskipun intersep berbeda antar negara namun intersep masing-masing negara tidak berbeda antar waktu, yang disebut *time invariant.* Untuk menentukan pendekatan yang lebih baik antara *Pooled Least Squared*/PLS dan *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan Uji Chow dengan hipotesis sebagai berikut:

1) H_0 : *Pooled Least Square* (PLS)
2) H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statitik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dengan model yang digunnakan adalah

Pooled Least Square (Widarjono, 2009) Perhitungan F Statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

$$\text{Fhitung} = \frac{\frac{SSE_1 - SSE_2}{(n-1)}}{\frac{SSE_2}{(nt-n-k)}} \sim F_{\boldsymbol{\alpha}\,(N-1,\ NT-N-K)}$$

Dimana SSE_1 merupakan *Sum Square Error* dari model *Pooled Least Squared*, SSE_2 merupakan *Sum Square Error* dari model *Fixed Effect Model*, n merupakan jumlah *cross section* negara), nt merupakan jumlah *cross section* dikalikan jumlah *time series*, k jumlah variabel bebas. Sedangkan F tabel didapat dari:

F-tabel = { : df(n-1, nt-n-k)}

Dimana $\boldsymbol{\alpha}$ merupakan tingkat signifikansi yang dipakai (alfa), n merupakan jumlah negara (*cross section*), nt merupakan jumlah *cross section* dikali jumlah *time series*, k merupakan jumlah variabel bebas

3. Uji Hausman / Random Effect

Untuk menentukan metode apa yang sebaiknya dipakai antara *fixed effect* atau *random effect*, digunakan metode yang dikembangkan oleh Hausman. Uji Hausman ini didasarkan bahwa penggunaan variabel *dummy* dalam metode *fixed effect* dan *GLS* adalah efisien sedangkan *OLS* tidak efisien, di lain pihak alternatifhya adalah metode *OLS* efisien dan metode *GLS* tidak efisien. Karena uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga Uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan df sebesar k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* dan sebaliknya. Secara matematis, uji ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$W = \left(\beta_{fe} - \beta_{re}\right)^1 \left[V\left(\beta_{fe}\right) - V(\beta_{re})\right]^{-1} \left(\beta_{fe} - \beta_{re}\right) \sim x^2(k) W$$

Estimasi dari matriks kovarian sebenarnya β_{fe} = estimator dari FEM β_{re} = estimator dari REM. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* (df) sebesar k di mana k adalah jumlah variabel independen perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:

1) H_0 : E (τ x_{it}) = 0 ; maka *Random Effect Model (*REM) adalah model yang tepat
2) H_1 : E (τ x_{it}) $\neq$ 0 ; maka *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang tepat

Pendekatan spesifikasi Haussman mengikuti distribusi Chi-Squared. Dalam Chi-$\text{Squared}_{\text{hitung}}$ > Chi-$\text{Squared}_{\text{tabel}}$ dan p-value signifikan maka H_0 ditolak sehingga pendekatan FEM lebih tepat digunakan.

E. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik daripada metode *common effect* maka digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Hipotesis dari LM Test adalah:

Ho: *Common effect*

Ha: *Random Effect*

Untuk melakukannya diperlukan formulasi sebagai berikut:

LM $= \frac{nT}{2(T-1)}\left[\frac{\sum_{i=1}^{n}[\sum_{t=1}^{n} eit]^2}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{n} e^2 it} - 1\right]^2$ Jumlah dari kuadrat jumlah residual

$\sum_{i=1}^{n}[\sum_{t=1}^{n} eit]^2$

$\sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{n} e^2 it$ *Sum Squared of Residual* dari *random effect*

n= Jumlah individu data

t= Jumlah tahun data

Nilai LM kemudian dibandingkan dengan nilai *chi-squares* pada *degree of freedom* (df) sebanyak jumlah variabel independen dan a = 1% dan a = 5%. Perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:

1) Ho = menggunakan model PLS, jika nilai LM < nilai *chi-squares*
2) Hi = menggunakan REM, jika nilai LM > nilai *chi-squares*

F. Pengujian Asumsi Klasik

1. Deteksi Multikolinearitas

Adanya dua asumsi penting tentang variabel gangguan yang akan memengaruhi sifat estimator yang BLUE. Pertana, varian dari variabel gangguan adalah tetap atau konstan (homokedastisitas). Kedua, tidak adanya korelasi atau hubungan antara variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi yang lain atau sering disebut tidak ada masalah autokorelasi (Widarjono, 2013). Pendeteksian terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance – Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF>10 maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi (Sanusi, 2014). Kecepatan dari meningkatnya varians atau kovarians dapat dilihat dengan *Variance Inflation Factor* (VIF), yang didefinisikan sebagai :

$$VIF = \frac{1}{(1 - R^2)}$$

Seiring dengan R^2 mendekati 1, VIF mendekati tidak terhingga. Hal tersebut menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinieritas meningkat, varian dari sebuah estimator juga meningkat, dan pada suatu nilai batas dapat menjadi tidak terhingga (Gujarati, 2010).

1) H_0: VIF > 10, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas
2) H_a: VIF < 10, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas

2. Uji Heterokedastisitas

Widarjono (2013) Suatu model yang terbebas dari heteroskedastisitas berarti variansi dari *error* bersifat konstan (tetap) atau dapat dikatakan homoskedastis. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan uji *White*. Model

dikatakan mengandung heteroskedastisitas jika statistik *white* (n x R^2) lebih besar dari χ^2 tabel. Cara lainnya adalah dengan menggunakan metode *GLS Weight Cross- section* yang tersedia dalam estimasi output program *EViews* . Nilai *Sum Square Resid (SSR) Weighted* dibandingkan dengan *Sum Square Resid (SSR) Unweighted*. Jika *SSR weighted* < *SSR Unweighted* maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas

3. Uji Autokorelasi

Widarjono (2013), salah satu asumsi penting dalam metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lain. Sedangkan autokorelasi merupakan adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antar satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Jadi dengan adanya autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) hanya *Linear Unbiased Estimator* (LUE). Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi yaitu melalui metode *Durbin-Watson*, Metode *Breusch-Godfrey*.

G. Uji Hipotesis t dan F statistik

1. Uji t (*t-test)*

Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Digunakan uji 1 arah dengan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat = 0,05. Hipotesis pengujian sebagai berikut:

1. $Ho_{(1)}$: Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Rumusan hipotesis yang digunakan:

   $H_0 : \beta_1 \leq 0$

   $Ha : \beta_1 < 0$

2. $Ho_{(2)}$: Diduga Ketimpangan Pendapatan berpengaruh Positif terhadap Kemiskinan. Rumusan hipotesis yang digunakan:

Ho: $\beta_2 \leq 0$

Ha : $\beta_2 > 0$

3. $Ho_{(3)}$: Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh Positif terhadap Kemiskinan. Rumusan hipotesis yang digunakan:

   Ho : $\beta_3 \leq 0$

   Ha : $\beta_3 > 0$

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1) Jika hipotesis positif, H_0 diterima apabila t-hitung < t-tabel, namun jika hipotesis negatif H_0 diterima apabila t-hitung > t-tabel, yang artinya variabel bebas tidak dipengaruhi oleh variabel terikat.
2) Jika hipotesis positif, H_0 ditolak apabila t-hitung > t-tabel, namun jika hipotesis negatif H_0 ditolak apabila t-hitung < t-tabel, yang artinya variabel bebas dipengaruhi oleh variabel terikat.

2. Uji F-Statistik

Uji F-Statistik digunakan untuk membuktikan apakah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel terikat. Nilai F-Statistik yang besar lebih baik dibandingkan nilai F-Statistik yang kecil. Nilai *Probability* (F-Statistik) merupakan tingkat signifikansi marginal dari F-Statistik, dengan hipotesis pengujian sebagai berikut:

H0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$

Ha : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$

Dimana:
β_1 = Indeks Pembangunan Manusia
β_2 = Ketimpangan Pendapatan
β_3 = Tingkat Pengangguran Terbuka

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1) Jika F Hitung > F-tabel, maka Ho ditolak, dan Ha diterima
2) Jika F Hitung ≤ F-tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak

Pada tingkat $\boldsymbol{\alpha}$ = 0,05 jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika Ho diterima berarti variabel

bebas yang diuji tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada $\boldsymbol{\alpha}$ = 0,05.

H. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi variabel terikat yang digunakan dalam penelitian. Nilai tersebut menunjukkan seberapa dekat garis regresi yang diestimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai R^2 terletak antara nol hingga satu. Semakin mendekati satu maka model akan semakin baik.

I. Individual Effect

Individual effect Dalam Widarjono (2013), merupakan nilai individu masing-masing cross-section yang di dapat dari *Fixed Effect model*. Rumus *individual effect* yaitu :

$$Ci = C + \beta$$

Di mana :

Ci = Individual Effect
C = konstanta
β = koefisien dari masing-masing Crossection

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Persenatse Penduduk Miskin pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Ketimpangan Pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Persenatse Penduduk Miskin pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Persenatse Penduduk Miskin pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan agar pemerintah memperhatikan Indek Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera

mengidentifikasikan faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat perlu ditingkatkan, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan khusus pada bidang pendidikan secara gratis dan cuma-cuma khususnya bagi masyarakat miskin. Sehingga kualitas sumber daya manusia 10 Provinsi di pulau Sumatera akan meningkat dan lebih baik. Perhatian pemerintah terhadap bidang kesehatan juga tidak bisa diabaikan, perlu ada peningkatan dengan pelayanan-pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas di setiap daerah-daerah yang tergolong miskin dan tertinggal.

2. Penulis mengharapkan agar pemerintah lebih serius untuk menangani masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan pada 10 Provinsi di Sumatera dengan kebijakkan lebih bervisi pada kebijakan yang pro kemiskinan tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengurangan kemiskinan dapat juga diupayakan melalui peningkatan investasi. Selain itu, pada pasca masa pandemi ini, pemerintah diharapkan mampu mempermudah proses perizinan usaha terutama bagi bisnis di sektor kesehatan. Hal ini dilakukan untuk merespon pesatnya minat pelaku usaha yang tinggi dalam pengajuan izin kesehatan..
3. Penulis berharap pemerintah memberlakukan kebijakan secara global pada provinsi-provinsi di pulau Sumatera, seperti misalnya kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh dana kredit, mengakses layanan publik, membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah Indoneisa juga harus lebih banyak lagi melakukan

perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru yang bersifat padat karya serta menggalakkan pengembangan sektor informal di pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar A. (2019). *Pengaruh Dana ZIS, PDRB, IPM dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: 10 Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2012-2016*). Universitas Brawijaya Malang.

Akhmad. (2015). *Dampak Pengeluaran pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Sepuluh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan*. Prosiding Seminar Nasional. Optimalisasi Hasil-Hasil Penelitian Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar. Halaman 16-26.

Akhmad, Alyas, Amir. (2018). The Effect Of Economic Growth And Income Inequality On Poverty In Indonesia. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) e- ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 9, Issue 4 Ver. II (Jul – Aug. 2018), PP 20-26* www.iosrjournals.org

Alan, K. M., Altman, Y., & Roussel, J. (2008). Employee Training Needs and Perceived Value of Training in the Pearl River Delta of China: *A Human Capital Development Approach*. Journal of European Industrial Training, 32 (1), 19-31.

Amaluddin, Rukmuin W. Payapo, Abdul A. Laitupa, Mohammad R. Serang (2018). A Modified Human Development Index And Poverty In The Villages Of West Seram Regency, Maluku Province, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial, Issues, ISSN: 2146-4138 available at http:* www.econjournals.com *International Journal of Economics and Financial Issues, 2018, 8(2), 325-330.*

Amir, A. 2007, *Perekonomian Indonesia (Dalam Perspektif Makro)*, Bogor: Penerbit Biografika.

Andi Ika Fahrika, Hasni Salam, Muhammad Abdi Buhasyim.(2020) Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi- Indonesia . *The International Journal of Social Sciences World TIJOSSW is Available Online at: Vol. 2 No. 02, October 2020, pages: 110~116 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.408074.Growingscholar Publisher ISSN 2690-5167*

Arief, H., Prastiwi, E.W. (2017), A Panel Data Analysis of the Role of Human Development Index in Poverty Reduction in Papua 2010-2015. Indonesia (Session CPS34): Proceedings 2 ISI Regional Statistics Conference. p20-24.

Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta.

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Peberbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.

Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). *Effects of Infrastructure, Investment, and Economic Growth on Community Welfare Through Job Opportunities*.. Jurnal EP Unud. 5(12): 1435-1462.

Ayala, L., Cantó, O., & Rodríguez, J. G. (2011). *Poverty and the business cycle: The role of the intra-household distribution of unemployment* (ECINEQ WP, 222).

Badan Pusat Statistik, 2009. *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan:* Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2009. *Indikator Ketenagakerjaan:* Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2010. *Tingkat Pengangguran Terbuka:* Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2015. *Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Wajo*. BPS : Wajo

Barika. (2012). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2009*. Jurnal

Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE UGM.

Dharmayanti, Yeni. 2011. ”*Analisis Pengaruh PDRB Upah dan Inflasi Terhadap Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009*”. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.

Ferdinand Niyimbanira.(2017). Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province. *International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138 available at http: www.econjournals.com International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7(4), 254-261*.

Frank, R. H., & Bernanke, B. S. 2007. *Principles of Microeconomics (3rd ed.).* New York: McGraw-Hill/Irwin.

Galor, O. & Moav, O. 2004. *From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development*. Review of Economic Studies, Vol. 71, (No.4) : 1001-1026

Ginting A.M. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013.JurnalKajian Vol. 20 No. 1 Maret 2015 hal. 45-58.

Jonaidi, A. (2012). Analysis of Economic Growth and Poverty in Indonesia. Journal of Economic Studies. 1 (1): 140-164 .Journal of Social Work and Development, 28(4), 295–310.

Kakwani, N. (2001), On Specifying Poverty Lines, Paper Presented at the Asia and Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Poverty Reduction, Asia Development Bank, Manila, 5-9 Februari,

Kuncoro, Murdrajat. 2006. "*Ekonomi Pembangunan*", Penerbit Salemba Empat,Jakarta.

L O Mardiyana dan H M Ani. (2018) The effect of education and unemployment on poverty in East Java Province, 2011-2016. *ICEGE 2018, IOP Conf. Series: International Journal Earth and Environmental Science 243 (2019) 012067 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/243/1/012067*

Lacabana, Miguel dan Cecilia Cariola. 2003. *Globalization and metropolitan expansion: Residential Strategies and Livelihoods in Caracas and its periphery, Environment and Urbanization* 2003; 15; 65 diakses melalui http://eau.sagepub.com pada tanggal 19 April 2009.

Lestari Sihite, Murni Daulay, Irsyad Lubis (2020).The Effect Of Village Funds, Human Development Index (HDI), And Economic Growth On Decrease Of Poverty Level In North Sumatera Province. *International Journal Public Budgeting, Accountiand Finance, Volume 4 Number 1, ISSN: 2655-6693,2020.*

Lian A. Yusuf , Sri Indriyani Dai (2020). The Impact of Unemployment and Human Development Index on Poverty in Gorontalo Province 2008-2017 . *JEJ, Jambura Equilibrium Journal .Volume 2. Issue 1. January 2020 P-ISSN 2655-9110 E-ISSN 2656-0445 http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/equij*

Lin, B.Q. (2003), "Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in Peo-ple's Republic of China," Asian Development Review, 20(2), 105-124.

Madjid, A. dkk. 2015 "*Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Kotamobagu*" Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.15, No.04, Tahun 2015, hlm. 113-123.

Mahardiki D. and R. P. Santoso. (2013). *Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi antar Propinsi di Indonesia 2006-2011*. JEJAK Journal of Economics and Policy 6 (2) (2013): 103-213.

Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mc Gee, T.G. 1995. *Metrofitting the Emerging Mega-UrbanRegions of ASEAN : An Overview dalam The Mega-Urban Regions of Southeast Asia.Vancouver*: BC Press, pp. 1-26.

Meo, M. S., Khan, V. J., Ibrahim, T. O., Khan, S., Ali, S., & Noor, K. (2018b). Asymmetric impact of inflation and unemployment on poverty in Pakistan: New evidence from asymmetric ARDL cointegration. Asia Pacific

Muhammad Saeed Meo, Bezon Kumar, Sumayya Chughtai Vina Javed Khan Muhammad Khyzer Bin Dost, Qasim Ali Nisar. (2020). Impact of Unemployment and Governance on Poverty in Pakistan: a Fresh Insight from Non-linear ARDL Co-integration Approach. *SAGE Journal Global Business Review 1–18 © 2020 IMI Reprints and permissions: in.sagepub.com/journals-permissions-india DOI: 10.1177/0972150920920440 journals.sagepub.com/home/gbr*

Mulyaningsih, Yani. 2008. *Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor public terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan*. Tesis : Universitas Indonesia.

Napitupulu, A.S. 2007. *Pengaruh Indikator Komposit IPM Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara*. Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara.

Negara A. K. K. dan Valeriani D. (2021). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.* Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.6 No.3 Hal.27-31

Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur. (2013). *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.* Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302: 172.

Nur Ahmar Fajriah. (2021). *Analysis Of The Effect Of Gross Regional Domestic Product, Number Of Population, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, And Human Development Index On Poverty In 2010-2020 East Java Province. JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) p-ISSN: 2541-1470; e-ISSN: 2528-1879 DOI: 10.20473/jiet.v6i2.27778.*

Nurhuda R, K. Muluk, dan W.Y. Prasetyo. (2012). *Analisis Ketimpangan Pembangunan* (Studi di Provinsi Jawa Timur 2005-2011) Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 4.

Priebe, Jan. 2014. "*Official Poverty Measurement in Indonesia since 1984: a Methodological Review*", Bulletin of Indonesian Economic Studies, jil. 50, no. 2, Agustus, hlm. 185-205.

Prima Sukmaraga, 2011. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan jumlah pengganggguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro.

Rahayu, S., Darus, H.M.B., & Hasyim, H. (2013). *Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Petani Padi (Studi Kasus: Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang*). Jurnal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness, 2(10).

Rastogi, P. N. (2002). Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creation. *Human Systems Management*, 229-240.

Rasidin, K dan Bonar M Sinaga. 2004. *Dampak Investasi, Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia*: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. http://ejournal.unud.ac.id

Ritonga, Hamonangan. 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta: Badan pusat Statistik.

Romer, P. M. 1999. *Endogenous Technological C*hange. Journal of Political Economy, 98(5), 71–102.

Rosen, H. S. 1999. *Public Finance*. New York: McGraw-Hill.

Saleem, H., Shabbir, M. S., & Khan, B. (2019). Re-examining multidimensional poverty in Pakistan: A new assessment of regional variations. Global Business Review. doi:10.1177/0972150919844412.

Saragih R. F. dkk. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.1 No.2 Hal.71-79.

Sari Y. A. (2021). *Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Equilibrium Vol.10 No.2 Hal.121-130

Sayifullah dan Gandasar T. A. (2016). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi-Qu. Vol.6 No.2 Hal. 236-255.

Sen, Amartya. 1976. *Poverty: An Ordinal Approach to Measurement. Econometrica*, Vol.44, No.2 (Mar, 1976), pp: 219-231. (Online).

Sholeh, Maimun.2010. Kemiskinan : *Telaah dan Beberapa Strategi Penaggulangannya*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Singh, G dan Belokar, R.M. (2012). Lean Manufacturing Implementation in the Assembly shop of Tractor Manufacturing Company. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-1, Issue-2, July 2012.

Singh, R. (2012), Human development index and poverty linkage. International Journal of Marketing and Technology, 2(5), 219-230.

Son, H. (2007), Interrelationship between Growth, Inequality, and Poverty: The Asian Experience, Asian Development Review, Vol. 24 No. 2 Hal. 37-63.

Sri, M. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Ekonomi.

Sugiarto, Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. 2015. *Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro*. Argo Ekonomi 26(3), 115-120.

Sukirno, S. 2008. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukirno. S. 2010. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Raja Wali.

Sukirno, S. 2013. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukirno S .(2014). Macroeconomics of Introduction Theory (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Sukirno, S. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Soesastro, H. Dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*. Jilid 1 (1945-1959). Jakarta: Kanisius.

Sukirno, S. 2016, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparman , Muzakir , Wahyuningsih , Mukhtar Tallesang .(2021). Economic Growth, Income Inequality, and Poverty in Central Sulawesi. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 4, No 4, November 2021, Page: 14117-14125 e-ISSN: 2615-3076 (Online), p-ISSN: 2615-1715 (Print)* 14118 *www.bircu-journal.com/index.php/birci email: birci.journal@gmail.com*

Suripto dan Subayil L. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidkan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinandi D.I.Yogyakartapriode 2010-2017*. Growth : Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. Vol.1 No.2 Hal.127-143.

Tambunan T .(2015). Indonesian Economy Old Order Era Until Jokowi (Bogor: Ghalia Indonesia)

Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.

Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. EdisiKetujuh, Terjemahan Haris Munandar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Todaro, M.P. 2006. *Economic Development*. Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.

UNDP. 1995. "*Human Development Report*" United Nations Development Programme. New York

United Nations Development Programme (UNDP). 1990. *Global Human Development Report*. Human Resources Department.

Winarti, A, 2014, *Analisis Pengaruh Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992 – 2012*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Winardi, J., 2007. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yandri, P. & Juanda, B. 2018. "*Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan Dengan Pendekatan Observasional"* Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan. Vol.19, No.1, April 2018, hlm. 75-84.

Yusuf A., H. Mark, G. Edimon and A.Priasto. (2014). *Reducing Disparity Through a Regions-Focused Development: A Modeling Approach to Assessing the Indonesia MP3I*. Working Paper in Economics and Development Studies, No. 201402, Departement of Economics, Padjadjaran University.